

- Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. -

**JAMINAN SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF PARLEMEN**

Sepenggal Analisis dari Legislasi Rancangan Undang-Undang
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Editor:

Dr. H. Syahganda Nainggolan, M.T.

Pengantar:

**Prof. Dr. Drs. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc.
Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, APT, M.Sc., PH.**

Judul:

JAMINAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PARLEMEN
Sepenggal Analisis dari Legislasi Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
xviii + 122 hlm.; 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-5562-03-7

Cetakan Pertama, 2017

Penulis:

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Editor:

Dr. H. Syahganda Nainggolan, M.T.

Pengantar:

Prof. Dr. Drs. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc.

Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, APT, M.Sc., PH.

Desain Sampul:

Dino Sanggrha Irnanda

Tata Letak:

Nur Saadah

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerja sama dengan:

Inteligensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jatim

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341- 573650 Fax. 0341-588010

www.intranspublishing.com

PENGANTAR

“Jaminan Sosial dalam Proses Pembuatan Kebijakan dan Perencanaan Sosial”

Oleh:

Prof. Dr. Drs. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc.

(Guru Besar Kebijakan dan Perencanaan Sosial, Program S3 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penulis, Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si., seorang peneliti pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI yang pernah menjadi mahasiswa saya pada Program S3 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Indonesia.

Adalah sebuah kehormatan ketika penulis meminta kepada saya untuk memberikan pengantar pada bukunya yang berjudul “Jaminan Sosial dalam Perspektif Parlemen: Sepenggal Analisis dari Legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”. Sebagai seorang mantan Promotor saya bangga, karena salah satu bimbingan saya tidak pernah berhenti berkarya dan menunjukkan semangat yang luar biasa untuk terus berprestasi, yang salah satunya adalah dengan menulis buku.

Dalam buku ini penulis mengemukakan hasil penelitian dan analisisnya terkait legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Secara khusus penulis menganalisis tentang jaminan sosial dalam perspektif Parlemen, di mana perspektif ini terkait dengan upaya yang

seharusnya dilakukan dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Parlemen memandang pentingnya perlindungan sosial yang diselenggarakan melalui sistem jaminan sosial nasional, yang bersifat universal, yang dapat diterapkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perspektif Parlemen ini kemudian berhasil memperjuangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, walaupun Parlemen menghadapi berbagai tantangan dan perdebatan-perdebatan sengit dengan Pemerintah.

Sebagai seorang Guru Besar Kebijakan dan Perencanaan Sosial, saya melihat buku ini dapat memperkaya Ilmu Kesejahteraan Sosial bukan saja pada materi tentang jaminan sosial, namun juga pada materi tentang *policy making process*, di mana legislasi telah menempatkan Parlemen dan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan-kebijakan sosial di bawah konstitusi. Dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diamanatkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, merupakan sebuah produk kebijakan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam hal ini merupakan bagian dari perencanaan sosial yang secara ideal dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan perencanaan sosial merupakan hal yang sangat penting, karena akan berdampak pada kesejahteraan sosial. Sebagaimana dikemukakan Gouh dalam Kennett (2004, p. 240-241), “*Social policy*:

1. *Is a policy, that is, an intentional action within the public sphere is achieve certain goals, not just whatever people do the secure their livelihoods;*
2. *Is oriented to social welfare goals, that is, some positive conceptions of human well-being, whether defined in terms of human needs, capabilities, active participation, equity, justice, and so on;*
3. *Operate through a wide variety of policy instruments across a number of sectors, that is, it may include land reform, agricultural support, work programmes, food subsidies, tax expenditures, as well as health, education and social protection programmes;*
4. *Is formulated and implemented by a wide spread of actors acting within a public sphere. This means that the field of social policy is not confined to the nation-state, but may extend downwards through regions to localities and associations wherever there is a recognizable ‘public sphere’, and upwards to transnational and global actors.”*

Berdasarkan Gough tersebut, maka legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat dipandang sebagai upaya pembuatan kebijakan sosial khususnya terkait masalah jaminan sosial. Legislasi ini dimaksudkan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Proses pembuatan kebijakan dilakukan pada lingkup yang luas di mana masyarakat diwakili oleh Parlemen yang berdiskusi dengan Pemerintah sebagai penyelenggara negara, dalam rangka menghasilkan kebijakan sosial yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam analisisnya penulis mengemukakan bahwa legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan upaya untuk mengatur penyelenggaraan jaminan sosial yang sistematis di Indonesia, dengan tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial masyarakat. Meskipun legislasi tersebut memakan waktu yang sangat panjang dan diwarnai perdebatan-perdebatan sengit antara Parlemen dan Pemerintah, namun akhirnya kedua pihak dapat menyetujui UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Legislasi tersebut dapat diibaratkan sebagai pintu gerbang kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah lahirnya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka pengaturan penyelenggaraan jaminan sosial akan berubah dari penyelenggaraan jaminan sosial yang bersifat parsial menuju sistem jaminan sosial yang sistematis dan universal untuk seluruh rakyat Indonesia.

Sebelum akhirnya menutup pengantar ini, saya ingin menyampaikan pendapat saya bahwa buku ini dapat memberi wawasan bagi pembaca. Materi yang disajikan cukup menarik, karena merupakan sesuatu yang baru dalam karya-karya tulis ilmiah di bidang Kesejahteraan Sosial. Gaya bahasa yang dipilih pun cukup mengalir, dengan pilihan-pilihan kata yang lugas dan mudah dimengerti, sehingga membuat secara keseluruhan buku ini terasa enak untuk dinikmati.

Selamat Membaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PENGANTAR

“Jaminan Sosial dan Kebijakan Publik”

Oleh:

Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, APT, M.Sc., PH.

(Pemerhati Kebijakan Publik, Mantan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada penulis buku ini, Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. yang telah secara sungguh-sungguh meneliti dan kemudian menuangkan pengetahuan dan pemikirannya mengenai jaminan sosial di Indonesia. Penelitian terhadap Dokumen Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan hal yang sangat menarik, karena selain substansinya yang strategis dari sisi sosial, juga posisi penulis sebagai pengamat yang sangat dekat dengan proses legislasinya itu sendiri.

Saya mengenal penulis, ketika yang bersangkutan sedang menempuh Program S3 pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Indonesia. Saya adalah salah satu informan yang diwawancarai terkait legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan beberapa waktu kemudian tanpa sengaja saya diminta oleh Ketua Program S3 pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Indonesia untuk menjadi salah satu penguji disertasinya yang berjudul “Proses Pembuatan Kebijakan Sosial di DPR RI: Perdebatan Gagasan tentang Kesejahteraan dalam Legislasikan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”. Tentu sebuah kebetulan yang membawa keberuntungan, karena peran saya sebagai

penguji pada sidang pra-promosi dan sidang promosi Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. juga sekaligus menjadi uji validitas bagi penelitiannya.

Menurut pendapat saya, legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan publik, dalam rangka menciptakan sebuah sistem perlindungan sosial yang mencakup seluruh rakyat Indonesia. Legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Parlemen dalam hal ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menghasilkan kebijakan publik berupa undang-undang, yang diharapkan dapat menjadi payung bagi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Masalah jaminan sosial dalam hal ini menjadi isu yang sangat aktual dan menarik, karena menyangkut tata cara pemenuhan kebutuhan dasar manusia (penduduk Indonesia). Oleh karena itu, sangat dapat dipahami munculnya berbagai konflik dan ketegangan di antara para pemangku kepentingan, karena legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ingin mengubah banyak tata cara penyelenggaraan 'jaminan sosial' yang sebelumnya telah *establish* selama beberapa dekade.

Dalam pandangan saya, perdebatan antara Parlemen dan Pemerintah adalah hal yang sangat biasa, karena memang itulah tugas dan fungsi mereka. Namun dalam konteks buku ini, saya melihat penulis memiliki kejelian dalam mengungkapkan sebuah peristiwa pada masa lalu, khususnya bagaimana Parlemen memandang masalah jaminan sosial yang secara ideal ingin dipersembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Penulis cukup menarik dalam menyampaikan fakta dan gagasan-gagasannya tentang jaminan sosial dalam Perspektif Parlemen. Dan pada akhir tulisannya, penulis menyimpulkan bahwa legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ibarat pintu gerbang kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah membangun perspektif yang lebih populis dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Dalam hal ini Parlemen sebagai lembaga legislatif telah memperlihatkan perspektifnya yang visioner terhadap upaya perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial dalam perspektif parlemen menempati posisi yang strategis, sehingga Parlemen berterkad kuat untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya saya ingin menyampaikan kesan saya, bahwa buku ini akan memperkaya Ilmu Kesejahteraan Sosial. Buku ini dapat dijadikan referensi bagi siapa saja yang memiliki minat dan komitmen yang kuat terhadap masalah jaminan sosial dan kesejahteraan.

Selamat Membaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PENGANTAR ---

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI merupakan pusat kegiatan ilmiah yang mengarahkan setiap produknya pada kebijakan nasional terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dari DPR RI.

Buku berjudul “Jaminan Sosial dalam Perspektif Parlemen: Sepenggal Analisis dari Legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” karya Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2017. Sebagai institusi penelitian yang memiliki komitmen untuk menghasilkan karya-karya ilmiah yang berimplikasi pada tugas dan fungsi DPR RI, maka Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI berupaya secara konsisten memproduksi berbagai jenis karya tulis yang didasarkan pada hasil Penelitian. Buku ini merupakan hasil karya yang disusun secara serius berdasarkan penelitian dokumentasi yang dilengkapi dengan hasil wawancara kepada

beberapa informan yang dinilai kredibel terhadap masalah jaminan sosial di Indonesia. Bahkan para informan yang diwawancara tersebut pernah terlibat dalam legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Besar harapan saya, buku ini dapat memperkaya pembaca dalam pengetahuan tentang jaminan sosial di Indonesia. Secara khusus, buku ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI khususnya yang bertugas di Komisi VIII dan Komisi IX dalam rangka mengawal pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial yang hingga kini terus menghadapi banyak tantangan dalam mencari solusi terkait masalah jaminan sosial untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Selamat membaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, November 2017
Kepala Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
NIP. 19711117 199803 1 004

Pengantar Editor

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk memberikan kontribusi bagi penyelesaian buku berjudul “Jaminan Sosial dalam Perspektif Parlemen: Sepenggal Analisis dari Legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” yang ditulis oleh sahabat saya, Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. Saya memiliki kesan pribadi tentang penulis, yaitu seorang peneliti yang tekun dan memiliki minat yang kuat terhadap masalah kesejahteraan sosial, khususnya jaminan sosial.

Saya merasa mendapat kehormatan untuk menjadi editor buku ini, karena saya merasa memiliki visi dan komitmen yang serupa terkait masalah jaminan sosial di Indonesia. Dan saya sungguh salut kepada sahabat saya, Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si yang telah bekerja keras untuk memaparkan pengetahuan dan analisisnya terkait jaminan sosial dalam perspektif Parlemen melalui buku ini. Mungkin ada berbagai versi analisis para pengamat terhadap legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial, namun buku ini mengambil hanya sebagian kecil dari berbagai versi tersebut. Walaupun demikian, hal tersebut tidaklah mengurangi arti penting dari buku ini. Dalam pandangan saya, buku ini cukup memberikan sumbangan pemikiran dan ikut menambah kekayaan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Buku ini menguraikan tentang perspektif Parlemen dalam memperjuangkan jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam pandangan penulis, ada perspektif yang berbeda antara Parlemen dan Pemerintah terkait masalah jaminan sosial di Indonesia. Hal utama yang menginspirasi penulis adalah bahwa jaminan sosial terkait dengan upaya perlindungan sosial yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya agar mereka dapat hidup secara layak. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dalam upaya perlindungan tersebut, Parlemen merupakan bagian dari negara yang memiliki otoritas dalam menentukan tata cara penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Penyelenggaraan jaminan sosial dalam hal ini harus diatur dengan undang-undang, dan oleh karena itu UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berlaku secara nasional di Indonesia. Namun yang menjadi masalah besar saat itu adalah lambannya respon Pemerintah dalam menyikapi dan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga akhirnya Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR RI.

Buku ini menganalisis legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan Dokumen Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan wawancara dengan beberapa informan yang pernah terlibat dalam legislasi tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa memang ada perspektif yang berbeda antara Parlemen dan Pemerintah selama legislasi. Pada bagian akhir bukunya, penulis menggaris-bawahi bahwa legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah membangun perspektif yang lebih populis dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Dalam hal ini Parlemen sebagai lembaga legislatif telah memperlihatkan perspektifnya yang visioner terhadap upaya perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial dalam perspektif Parlemen menempati posisi yang strategis, sehingga Parlemen

berterkad kuat untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui sistem jaminan sosial nasional yang menerapkan 9 (sembilan) prinsip penyelenggaraan jaminan sosial.

Sebagai akhir dari pengantar buku ini, saya ingin menyampaikan kesan pribadi saya bahwa buku ini memberikan sesuatu yang baru dan layak dibaca.

Selamat Membaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, November 2017

Editor

Pengantar Penulis

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menulis buku merupakan salah satu tugas utama seorang peneliti, di mana buku merupakan bukti nyata kontribusi peneliti kepada Ilmu Pengetahuan. Tak jarang seorang peneliti menghadapi berbagai kendala dalam mengungkapkan gagasan dan analisisnya terhadap suatu permasalahan, namun bukan berarti peneliti akan menyerah begitu saja, dan menulis buku menjadi suatu keniscayaan yang harus disadari.

Buku berjudul “Jaminan Sosial dalam Perspektif Parlemen: Sepenggal Analisis dari Legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” ini merupakan hasil pencarian, penggalian, renungan, dan kajian yang telah beberapa tahun dilakukan, dengan kegiatan utama mempelajari dokumen pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kajian ini juga dilengkapi telaah terhadap hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yang merupakan pelaku yang terlibat aktif dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sisi menarik dari proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menjadi fokus analisis dalam buku ini adalah perspektif Parlemen terkait masalah jaminan sosial di Indonesia. Hal ini menjadi sangat penting untuk dikaji karena jaminan sosial memiliki peran yang strategis di tengah perkembangan masyarakat global yang memandang hak asasi manusia sebagai pijakan dasar dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Terjadinya perdebatan-perdebatan sengit antara Parlemen dan Pemerintah menunjukkan adanya perspektif yang berbeda di antara kedua lembaga negara tersebut, walaupun ada kesamaan tujuan dari legislasi, yaitu memberikan jaminan sosial yang adil dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Akhirnya penulis berharap agar buku ini bukan saja dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mencakup legislasi, pengawasan, dan anggaran, namun juga agar buku ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial, selain juga dapat memberi inspirasi bagi penelitian dan penulisan buku yang serupa pada masa yang akan datang. Tak lupa penulis mengucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penerbitan buku ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, November 2017

Penulis

Daftar Isi

Pengantar Prof. Dr. Drs. Bambang Shergi Laksmo, M.Sc.	iii
Pengantar Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, APT, M.Sc., PH.	vi
Pengantar Kepala Pusat Penelitian	ix
Pengantar Editor	xii
Pengantar Penulis	xv
Daftar Isi	xvii
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.4. Sitematika	8
BAB 2: JAMINAN SOSIAL DAN LEGISLASI: TINJAUAN KONSEP	10
2.1. Jaminan Sosial	10
2.2. Sistem Jaminan Sosial Nasional	25
2.3. Parlemen dan Legislasi	29
BAB 3: JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA	36
3.1. Sebelum UU SJSN	36
3.1.1. Jaminan Sosial Kesehatan Sebelum UU SJSN	37
3.1.2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebelum UU SJSN	39
3.2. Setelah UU SJSN	42
3.2.1. Jaminan Sosial Kesehatan Setelah UU SJSN	42
3.2.2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Setelah UU SJSN	45

BAB 4: LEGISLASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL	49
4.1. Inisiasi: Kegagalan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan	49
4.2. Legislasi: Parlemen Versus Pemerintah	52
4.3. Persetujuan: Klimaks Perdebatan yang Melelahkan	61
BAB 5: JAMINAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PARLEMEN ..	75
5.1. Peran Parlemen	75
5.2. Jaminan Sosial dalam Perspektif Parlemen	78
5.3. Jaminan Sosial Bidang Kesehatan	84
5.4. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	86
BAB 6: PENUTUP	89
Indeks	92
Daftar Pustaka	98
Biografi Penulis	104
Biografi Editor	120

Indeks

A

Akuntabel 16, 80

Anggaran 6, 11, 14, 26, 27, 29, 31, 34, 39, 42, 90

ASABRI 27, 40, 41, 45, 51, 53, 54, 57, 59, 62, 63, 75, 84, 86, 92, 99

Askes 27, 37, 38, 39, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 83, 85, 90, 97

Asuransi 19, 20, 22, 37, 38, 40, 41, 44, 58, 81, 86, 90, 94

B

Badan 4, 6, 9, 10, 38, 49, 53, 54, 60, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 108,
111, 112, 117

BPJS 4, 5, 7, 9, 10, 24, 27, 29, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 96, 111, 114, 117

C

Contempt of parliament 56, 59

D

DPR RI 6, 10, 30, 32, 33, 34, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60,
62, 90, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 117

Draft 50, 51, 52, 55, 79

F

Fraksi 33, 52, 62, 63, 78

Friedlander 12, 13, 14, 20, 38, 79, 80, 87, 88, 89, 93

Fully funded 61, 89, 92

G

Gagasan 2, 3, 4, 6, 32, 33, 38, 45, 63

Gotong royong 3, 14, 17, 20, 28, 29, 83, 84, 86

Gugatan 51

H

Hak 22, 79, 99, 108, 109, 112

Human Capital 23, 24, 82, 86, 93, 94

Human Investmen 23, 24, 82, 86

I

Indonesia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 20, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 52, 57, 59, 61, 76, 77, 78, 79, 80, 82 83, 84, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117

Informan 7, 9, 36, 52, 60, 61, 63, 75, 84, 87

iuran 3, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 51, 57, 58, 83, 86, 90

J

Jaminan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 59, 60, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 108, 111, 112, 114

Jaminan Kesehatan 37, 39, 59, 95, 96, 101, 111, 112

Jaminan sosial 1, 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 37, 40, 41, 50, 80, 87, 88, 92

Jaminan Sosial Tenaga Kerja 40, 41, 42, 45, 46, 87

Jamsostek 22, 27, 39, 41, 42, 45, 46, 51, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 83, 85, 87, 90, 97, 117

JHT 4, 22, 41, 45, 46, 47, 48, 51, 59, 87, 90

JKK 4, 41, 45, 46, 87

JKm 4, 41, 45, 46, 87

JKN 4, 28, 37, 44, 101

JP 4, 22, 41, 45, 46, 87, 90

K

- Kebijakan 26, 32, 37, 94, 95, 102, 106, 107, 108, 109, 116, 117
 kebutuhan dasar 1, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 27, 46, 50, 51, 58, 76,
 79, 81, 83, 87
 Kelompok 100, 101, 102, 113
 Kemanfaatan 14, 43, 88
 Kementerian 53, 54, 56, 60, 62
 Kesamaan persepsi 10, 61
 Kesehatan 24, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 59, 62, 84, 85, 86, 95,
 96, 101, 111, 112, 114
 Kesejahteraan 6, 10, 11, 12, 13, 19, 49, 79, 81, 94, 95, 100, 102, 105,
 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 117
 Kesejahteraan Masyarakat 110, 111
 Kesejahteraan Rakyat 1, 10, 11, 12, 25, 29, 78, 79, 80, 82
 Kesejahteraan Sosial 6, 19, 81, 94, 95, 100, 106, 107, 108, 109, 116, 117
 Kesejahteraan Sosial Masyarakat 79, 90
 Kesepakatan 29, 53, 55, 62, 75, 77, 82
 Kewenangan 10, 29, 47, 50, 55, 60, 90
 Komisi 6, 51, 52, 53, 103, 104
 Kompensasi 26, 83
 Komprehensif 6, 8, 26, 41, 50, 83
 konsep 8, 9, 10, 25, 38, 52, 54, 55, 61, 82
- ## L
- Legislasi 4, 6, 8, 9, 10, 11, 29, 32, 33, 49, 53, 75, 77, 78, 90, 91, 92, 108
 Legislatif 5, 30, 31, 47, 50, 77, 92
- ## M
- Mahasiswa 102, 103, 108, 116
 Mampu 1, 2, 3, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 41, 42,
 43, 44, 49, 51, 61, 76, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 91
 Masyarakat 19, 37, 39, 81, 94, 95, 100, 103, 108, 109, 110, 111, 112,
 113, 114

Midgley 11, 79, 94

Miskin 37, 39, 104, 109, 110, 114

N

NA 34, 50, 51, 52, 55, 79

Nasional 2, 25, 28, 38, 50, 52, 54, 83, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 111, 112, 114

Naskah Akademik 34, 35, 79, 104

Negara 1, 2, 3, 10, 29, 38, 39, 51, 58, 94, 98, 108, 114

Nirlaba 3, 59

P

Pansus 55, 56, 59, 75, 98

Parlemen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 104, 106, 114

Partai Politik 30, 31, 33, 76, 77

Pay as you go 26, 27, 41, 61, 88, 89, 92

PBI 43

Pekerja 59, 95, 100, 102, 104, 110, 112, 117

Pelayanan 2, 12, 16, 20, 21, 25, 26, 39, 41, 42, 43, 45, 57, 79, 83, 86, 91

Pembahasan 53, 54, 103, 104

Pemerintah 11, 13, 21, 25, 30, 31, 35, 37, 47, 50, 76, 81, 83, 90

Penerima bantuan iuran 43

Pensiun 4, 15, 16, 23, 26, 27, 40, 41, 47, 51, 57, 58, 61, 83, 87, 88, 89, 92

Penyelenggaraan 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 25, 26, 36, 37, 40, 42, 44, 53, 56, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 90, 92, 111

Penyusunan 34, 52, 55, 79, 90

Peran 6, 8, 9, 14, 16, 22, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 52, 53, 61, 76, 77, 78, 80, 82

Perdebatan 53, 56, 57, 60, 62, 77

Perlindungan sosial 5, 15, 16, 17, 19, 22, 38, 47, 80, 81, 82, 87, 92

Perspektif 4, 5, 6, 7, 8, 9, 35, 56, 84, 85, 87, 91, 92, 97

Peserta 39, 96

Pilar 13, 22, 27, 80, 83, 89

PNS 38, 39, 40, 51, 57, 58, 59, 61, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 114

Polri 39, 40, 41, 51, 57, 58, 59, 61, 85, 86, 87, 88, 92, 96, 104, 113, 114

Portabel 28

Premi 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 57, 61, 82, 88, 90

Profesional 3, 4, 39, 40, 43, 87, 89

Profit 16, 27, 37, 80, 83

Program 2, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 26, 31, 32, 37, 38, 40, 41, 45,
46, 49, 52, 54, 57, 58, 60, 61, 79, 80, 81, 83, 88

R

Rakyat 28, 59, 105, 110, 112

RDPU 50, 54, 57, 90

Reformasi 2, 37, 89

Risiko 13, 21, 40, 41, 61, 80, 87, 89, 96

RUU 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 32, 33, 34, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
59, 60, 61, 62, 63, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 113

S

Sistem 2, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 43, 50, 80, 82, 83, 89, 93, 94, 95, 98,
102, 103, 107, 108, 112

Sistematik 8, 36

SJSN 2, 3, 4, 5, 6, 8, 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 52,
54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 77, 83, 84, 90, 92

Sosial 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 22, 23, 25, 28, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 49,
50, 51, 52, 54, 60, 75, 79, 81, 83, 84, 86, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 116, 117

Suharto 19, 38, 81, 95

T

Taspen 22, 27, 40, 41, 45, 47, 51, 53, 54, 58, 61, 62, 83, 86, 90, 114

TNI 39, 40, 41, 51, 57, 58, 59, 61, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 96, 99

Transformasi 47, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 75, 77, 84, 85, 87, 90, 91

Transparan 16, 35, 80

U

Undang-Undang 1, 2, 4, 6, 9, 10, 49, 95, 98, 106, 108, 114

Upah 3, 27, 48, 83

Upaya 100, 102, 109, 110, 111, 112, 114

Usia 1, 2, 4, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 42, 44, 46, 48, 53, 56, 61, 76, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 96, 108, 109, 117

UU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 100, 101, 103, 104, 108, 111, 113, 114

UU BPJS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 36, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98

UU SJSN 2, 3, 4, 5, 6, 8, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 77, 83, 90, 92

W

Wakil rakyat 6, 33, 78

Wewenang 76

Daftar Pustaka

Buku:

- Abidin, Yusuf Zainal & Saebani, Beni Ahmad. (2014). *Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ashman, Karen K. Kirst. (2007). *Introduction to Social Work & Social Welfare: Critical Thinking Perspectives, Second Edition*. California: Thomson Higher Education.
- Asyhadie, Zaeni. (2007). *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barusch, Amanda Smith. (2006). *Foundations of Social Policy: Social Justice in Human Perspective, Second Edition*. California: Thomson Higher Education.
- Becker, Gary S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, Third Edition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Blakemore, Ken & Griggs, Edwin. (2007). *Social Policy: An Introduction, Third Edition*. Berkshire: Open University Press.
- Budiardjo, Miriam. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dean, Hartley. (2002). *Welfare Rights and Social Policy*. Harlow: Pearson Education Ltd.
- Butler, Ian & Drakeford, Mark. (2003). *Social Policy, Social Welfare and Scandal*. New York: Palgrave MacMillan.
- Faulks, Keith. (2010). *Sosiologi Politik: Pengantar Kritis, (Penerjemah: Helmi Mahadi & Shohifullah)*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Friedlander, Walter A. & Apte, Robert Z. (1980). *Introduction to Social Welfare, Fifth Edition*. New Jersey: Prentice Hall International.

- Hays, R. Allen. (2001). *Who Speaks for the Poor?* New York: Routledge.
- Ihsan, A. Bakir. (2009). *Etika dan Logika Berpolitik: Wacana Kritis atas Etika Politik, Kekuasaan, dan Demokrasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ingham, Jon. (2007). *Strategic Human Capital Management: Creating Value through People*. Burlington: Elsevier.
- Jordan, Bill. (1987). *Rethinking Welfare*. Oxford: Basil Blackwell Ltd.
- Kuenne, Robert E., (Ed). (2000). *Readings in Social Welfare: Theory and Policy*. Oxford: Blackwell.
- Kropotkin, Peter. (2006). *Gotong Royong Kunci Kesejahteraan Sosial: Tumbangnya Darwinisme Sosial*, Penerjemah: Tim Redaksi Piramedia. Depok: Piramedia.
- Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Midgley, James. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publications Ltd.
- Mulyana, Deddy. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Padgett, Deborah K. (1998). *Qualitative Methods in Social Work Research: Challenges and Rewards*. California: Sage.
- Pakpahan, Muchtar. (2010). *Ilmu Negara dan Politik*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
- Pranowo, M. Bambang. (2010). *Multidimensi Ketahanan Nasional*, Kata pengantar:
- Purnomo Yusgiantoro. Jakarta: Penenrbit: Pustaka Alfabet.
- Putra, Dedi Kurnia Syah. (2015). *Komunikasi CSR Politik: Membangun Reputasi, Etika, dan Estetika PR Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahardjo, Irvan. (2012). *Politik Asuransi Indonesia: Liku-liku Kebijakan Industri Asuransi Nasional*. Jakarta: Penerbit Gagas Bisnis Indonesia.
- Rasyid, Ryaas. (2009). *Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).

- Saebani, Beni Ahmad & Haqiq, Javid Ria Rahman. (2016). *Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Shihab, Ahmad Nizar. (2013). *BPJS: Jalan Panjang Mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Depok: CINTA Indonesia.
- Situmorang Chazali H. (2013). *Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia, Transformasi BPJS: "Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalann"*. Depok: Cinta Indonesia.
- Soendoro, Emir. (2009). *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*. Jakarta: Dinov ProGress.
- Stein, Theodore J. (2001). *Social Policy and Policymaking by the Branches of Government and the Public-at-Large*. New York: Columbia University Press.
- Subianto, Achmad. (2010). *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Pilar Penyangga Kemandirian Perekonomian Bangsa*. Jakarta: Gibon Books.
- Suharto, Edi. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat – Memberdayakan Masyarakat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulastomo. (2008). *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana. (2001). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syamsuddin, Aziz. (2010). *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: (t.p.)
- Thabrany, Hasbullah. (2015). *Jaminan Kesehatan Nasional*, Edisi Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Triwibowo, Darmawan & Subono, Nur Iman, Ed. (2009). *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia: Lebih dari Sekedar Pengurangan Kemiskinan*. Jakarta: Prakarsa & LP3ES.
- Wisnu, Dinna. (2012). *Politik Sistem Jaminan Sosial: Menciptakan Rasa Aman dalam Ekonomi Pasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yuliandri. (2013). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal:

Cartwright, Matthew. (2013, Sept 18). *Co-Sponsors Legislation to Strengthen Social Security*. Lanham: Federal Information & News Dispatch. <http://search.proquest.com/docview/1433849436?accountid=17242>, Access September 25, 2014.

Mujiati & Yuyun Yuniar, “Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional di Delapan Kabupaten-Kota di Indonesia”, *Media Litbangkes*, Vol. 26 No. 4, Desember 2016, 201–210.

Weiner, Anthony D. (2011, Mar 15). *Announce Legislation to Defend Social Security*. Lanham: Federal Information & News Dispatch. <http://search.proquest.com/docview/857184722?accountid=17242>, Access September 25, 2014.

Website:

APB Group, “Studi Dokumentasi”, <http://www.apb-group.com/studi-dokumentasi/>, Diakses 25 Agustus 2017.

“Asabri Beri Proteksi Terhadap Risiko Khusus TNI dan Polri”, <http://marketeers.com/asabri-beri-proteksi-terhadap-risiko-khusus-tni-dan-polri/Finance>, Diakses 2 September 2017.

“Bebas Resiko, Bunganya di Atas Deposito?”, https://finance.detik.com/moneter/3415776/manfaat-jht-bebas-risiko-bunganya-di-atas-deposito?utm_source=27047, Diakses 20 Februari 2017.

“BPJS Kesehatan: Jumlah Peserta”, <http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/jumlahPeserta>, Diakses 6 September 2017.

“European Report of Development”, https://ec.europa.eu/europeaid/policies/research-development/research/european-report-development-2010-social-protection-inclusive_en, Diakses 6 September 2017

“International Labour Organization Convention 102 - Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952”, http://blue.lim.ilo.org/cariblex/pdfs/ILO_Convention_102.pdf, Diakses 2 September 2017.

Irfani, Nurfaqih (2012). *Organisasi Jaminan Sosial Republik Federal Jerman*, www.jamsosindonesia.com. Diakses 27 Desember 2015.

Laksono Trisnantoro, (2015, Kompas 21 Agustus), “Sektor Kesehatan: Setelah 70 Tahun Indonesia Merdeka”, <http://kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/2457>, Diakses 31 Agustus 2017.

“Mengenai Jaminan Sosial: Jamsostek di Indonesia”, <http://www.infosdm.com/mengenai-jaminan-sosial-jamsostek-di-indonesia/>, Diakses 6 September 2017.

“Perspektif”, <https://kbbi.web.id/perspektif>, Diakses 26 September 2017.

“Perspektif”, <https://kbbi.web.id/perspektif>, Diakses 26 September 2017.

“Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Disempurnakan”, http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/categories/Mjg?keyword=&per_page=20, Diakses 6 September 2017.

“Sejarah Perusahaan”, http://www.taspen.co.id/?page_id=28, Diakses 2 September 2017.

“Sejarah Singkat PT Askes Persero”, https://www.academia.edu/5246024/Sejarah_Singkat_PT_ASKES_Persero_Status_Perusahaan_Persero, Diakses 2 September 2017.

“Top of Form Sejarah Singkat PT ASABRI Persero”, Bottom of Form https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=173186076100440&id=172096309542750, Diakses 2 September 2017.

“Sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial, Sebuah Solusi?”, <https://alghif.wordpress.com/2014/06/25/sengketa-di-pengadilan-hubungan-industrial-sebuah-solusi/>, Diakses 2 September 2017.

“Universal Declaration of Human Right”, <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>, Diakses 2 September 2017.

Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain:

Dokumen/Risalah Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Hasil Wawancara dengan Bp. Indra Munaswar (Komite Aksi Jaminan Sosial), Jakarta, 23 April 2014.

Hasil Wawancara dengan Bp. Dr. Drs. H. Chazali Situmorang. Apt., M.Sc. (Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional), Jakarta, 23 April 2014.

Hasil Wawancara dengan Bp. Dr. Ahmad Nizar Shihab, D.S.A.N. (Ketua Pansus RUU BPJS), Jakarta, 11 Juni 2014.

Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Endang Augstini Syarwan Hamid, S.I.P (Anggota Fraksi Partai Golkar), Jakarta, 11 Juni 2014

Hasil Wawancara dengan Bp. Dr. Mulia P. Nasution (Mantan Sekjen Kemenkeu RI), Jakarta, 19 Juni 2014.

Jawaban Tertulis Bp. Zuber Safawi (Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), Jakarta, 24 Juni 2014.

Biografi Penulis



1. Nama: **Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si**
2. Jenis Kelamin: Perempuan
3. Agama: Islam
4. Tempat/Tgl. Lahir: Klaten, 25 April 1965
5. Keluarga:
 - 5.1. Supono S.H., S.E., M.M., M.H. (Suami, Hakim Ad Hoc PHI PN Jakarta Pusat)
 - 5.2. Damartama Putra Akbar Nusantara, S.Tr.Han (Anak, Anggota TNI AL – Koarmatim, Surabaya)
 - 5.3. Briliani Putri Pijar Pratiwi (Kelas 9 SMPN 11 Kota Tangerang Selatan)
6. Jabatan: Peneliti Madya / IVc
7. Alamat Kantor:

Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI
Gedung Nusantara I Paripurna Lt. 2
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, 10270
8. Telp/Fax/Hp: (021) 5715372 / 081389936370
9. Alamat Rumah:

BSD Nusa Loka Sektor 14.6 Jl. Ambon Blok HA/10
Kota Tangerang Selatan, Banten, 15318

10. *Email* :

10.1. hartiniretnaning@yahoo.com

10.2. hartini.retnaningsih@dpr.go.id

11. Pendidikan:

11.1. SD Negeri Karang 1, Kecamatan Wedi, Klaten, lulus tahun 1977.

11.2. SMP Negeri 1 Wedi, Klaten, Jawa Tengah, lulus tahun 1981.

11.3. SMA Negeri 2 Klaten, Jawa Tengah, lulus tahun 1984.

11.4. S1 Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, lulus tahun 1990.

11.5. S2 Jurusan Sosiologi Kekhususan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Jakarta, lulus tahun 2000.

11.6. S3 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UI, Jakarta, lulus tahun 2016.

12. Riwayat Pekerjaan:

12.1. Tahun 1992-Sekarang, Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.

13. Pengalaman Penelitian

13.1. Penelitian “*Dampak Sosial Implementasi UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terhadap Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi terhadap Yayasan di Lima Kota: Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya)*”, tahun 2003. – Penelitian Kelompok, sebagai Anggota Tim Penelitian.

13.2. Penelitian “*Pencapaian Target Millenium Development Goals (MDGs) dalam Pengendalian Penyakit Menular, Peningkatan Akses Berkelanjutan atas Air Minum Layak dan Sanitasi Dasar, serta Perbaikan Permukiman Kumuh Perkotaan*”, tahun 2011. – Penelitian Kelompok, sebagai Ketua Tim Penelitian.

13.3. Penelitian “*Pengelolaan Balai Latihan Kerja (Studi tentang BBLKI Surakarta dan BLK Sulawesi Utara)*”, tahun 2012. – Penelitian Kelompok, sebagai Ketua Tim Penelitian.

13.4. Penelitian berdasarkan *Surat Tugas No: PK/276/DPR-RI/IX/2012* – Penelitian kelompok dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau”, tahun 2012 – Penelitian Kelompok, sebagai Anggota Tim Penelitian.

- 13.5. Penelitian “*Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur)*”, tahun 2012 – Penelitian Individu.
- 13.6. Anggota Tim Pejabat Penilai Instansi (P2I) untuk Peneliti Setjen DPR RI Tahun 2013.
- 13.7. Penelitian “*Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah: Pengawasan Jamu (Baik Produk Asli Indonesia maupun Impor) dan Kandungan Bahan Berbahaya*”, tahun 2013 – Penelitian Kelompok, sebagai Ketua Tim Penelitian.
- 13.8. Anggota Tim Pejabat Penilai Instansi (P2I) untuk Peneliti Setjen DPR RI Tahun 2014.
- 13.9. Penelitian “*Ketersediaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional*” (Studi di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Kota Jayapura, Provinsi Papua), tahun 2014 – Penelitian Kelompok, sebagai Anggota Tim Penelitian.
- 13.10. Anggota Tim Pejabat Penilai Instansi (P2I) untuk Peneliti Setjen DPR RI Tahun 2015.
- 13.11. Penelitian “*Evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Studi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Riau)*”, tahun 2015.- Penelitian Kelompok, sebagai Anggota Tim Penelitian.
- 13.12. Penelitian berdasarkan *Surat Tugas No: DAP/07159/SETJEN-DPR RI/PK/05/2015* - Penelitian kelompok dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Studi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Riau”, di Provinsi Riau, tanggal 25 s/d 31 Mei 2015 - Penelitian Kelompok, sebagai Anggota Tim Penelitian.
- 13.13. Anggota Tim Koordinasi Penelitian, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016.
- 13.14. Penelitian berdasarkan *Surat Tugas No: BK/05210/SETJEN-DPR RI/PP/03/2016*– Penelitian individu dengan tema “Implemen-

tasi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan dan Harapan peningkatan Kesejahteraan Pekerja di Kota Surabaya dan Kota Pekanbaru”, tahun 2016 – Penelitian Individu.

- 13.15. Penelitian berdasarkan *Surat Tugas No: BK/04670/SETJEN-DPR RI/PP/03/2016* – Penelitian kelompok dengan tema “Ketahanan Keluarga: Perspektif Fisik, Sosial, dan Psikologis (Studi di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, tahun 2016 – Penelitian Kelompok, sebagai Anggota Tim Penelitian.
 - 13.16. Anggota Tim Koordinasi Penelitian, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI Tahun 2017.
 - 13.17. Penelitian berdasarkan *Surat Tugas No. BK/13140/SETJEN DPR RI/PP/07/2017* – Penelitian individu dengan tema “Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan)”, tahun 2017 – Penelitian Individu.
 - 13.18. Penelitian berdasarkan *Surat Tugas No: BK/07556/SETJEN-DPR RI/PP/03/2017* – Penelitian kelompok dengan tema “Pengawasan Ketenagakerjaan dan Upaya Menuju Kesejahteraan Pekerja (Studi di Provinsi Aceh dan Provinsi Nusa Tenggara Barat)” tahun 2017 – Penelitian Kelompok.
14. Pengalaman Akademis
- 14.1. Tahun 1992-1996, Asisten Dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta.
 - 14.2. Tahun 2001-2010, Dosen di STIE Putra Perdana Indonesia, Tangerang.
 - 14.3. Tahun 2005-2006, Dosen di STIE Bisnis Indonesia, Tangerang.
 - 14.4. Penguji Seminar Proposal Desertasi “Mengkaji Konsepsi Program Perlindungan Sosial di Era Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla”, Mahasiswa: Herlan, NPM. 1406593805.
 - 14.5. Co-Promotor Desertasi “Mengkaji Konsepsi Program Perlindungan Sosial di Era Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla”, Mahasiswa: Herlan, NPM. 1406593805.

15. Pengalaman Jurnal/Editing:

- 15.1. Redaksi Jurnal Kajian Tahun 1996
- 15.2. Redaksi Jurnal Kajian Tahun 1997
- 15.3. Redaksi Jurnal Kajian Tahun 1998
- 15.4. Redaksi Jurnal Kajian Tahun 1999
- 15.5. Redaksi Jurnal Kajian Tahun 2000
- 15.6. Redaksi Jurnal Kajian Tahun 2009
- 15.7. Redaksi Jurnal Kajian Tahun 2010
- 15.8. Redaksi Info Singkat Tahun 2010
- 15.9. Redaksi Jurnal Kajian Tahun 2011
- 15.10. Redaksi Info Singkat Tahun 2011
- 15.11. Redaksi Jurnal Kajian Tahun 2012
- 15.12. Redaksi Info Singkat Tahun 2013
- 15.13. Redaksi Jurnal Kajian Tahun 2013
- 15.14. Editor Buku, Sri Nurhayati Qodriyatun (Penulis), *“Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi: Studi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Desa Konservasi”*, Penerbit: P3DI Setjen DPR RI Jakarta & Azza Grafika Yogyakarta (anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012), ISBN: 978-602-1247-04-4, Cetakan Pertama, 2013.
- 15.15. Redaksi Jurnal Kajian Tahun 2016
- 15.16. Redaksi Jurnal Kajian Tahun 2017
- 15.17. Editor Jurnal Info Singkat Tahun 2017

16. Pengalaman Keahlian:

- 16.1. Anggota Tim Asistensi Komisi VII DPR RI dalam Pembahasan RUU Perlindungan Anak, tahun 2002-2003.
- 16.2. Anggota Tim Asistensi Komisi X DPR RI dalam Pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional, tahun 2002-2003.
- 16.3. Anggota Tim Asistensi Komisi V DPR RI dalam pembahasan RUU Permukiman dan Perumahan, tahun 2010-2011.
- 16.4. Anggota Tim Asistensi Komisi VII DPR RI dalam Pembahasan RUU Fakir Miskin, tahun 2010-2011.

- 16.5. Anggota Tim Asistensi Komisi X DPR RI dalam Pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran, tahun 2013.
- 16.6. Anggota Tim Pidato untuk Ketua DPR RI, tahun 2012-2013.
- 16.7. Koordinator Tim Asistensi Komisi IX DPR RI Tahun 2015.
- 16.8. Anggota Tim Pengawasan Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Badan Keahlian DPR RI.
- 16.9. Anggota Tim Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Praktik Pekerjaan Sosial, Badan Keahlian DPR RI.
17. Kursus/Diklat/Seminar:
 - 17.1. Perumus dalam Diskusi Sehari “*Manajemen/Kinerja Polri*”, Badan Kontak Purnawirawan-Warakawuri Polri Tingkat Mabes & PTIK, Jakarta, 8 Desember 1993.
 - 17.2. “*Pelatihan Staf Peneliti di Komisi-Komisi DPR RI*”, LPEM UI, Jakarta, 26 Juli s.d 13 Agustus 1993.
 - 17.3. “*Satisfactory Completed Advanced (Level 6) English Conversation Course*”, English Education Center, Jakarta, 23 August 1993.
 - 17.4. Seminar “*Praktek Santet & Tinjauan Yuridis*”, IKADIN & PTIK, Jakarta, 17-18 Desember 1993.
 - 17.5. Lokakarya “*Teknik Membaca Cepat*”, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya, Jakarta, 07-22 Februari 1994.
 - 17.6. “*Pelatihan Statistik*”, Lab Sosiologi FISIP UI, Jakarta, 2-7 Mei 1994.
 - 17.7. “*Satisfactory Completed the 50-Hour English for Special Purposes*”, English Education Center, Jakarta, 3 May 1995.
 - 17.8. Studi banding tentang pusat penelitian (*supporting system*) di Parlemen Thailand, Bangkok, Thailand, 1997.
 - 17.9. Seminar Nasional “*Pekerja Sosial Profesional Indonesia*”, Jakarta, 18 Agustus 1998.
 - 17.10. Peninjau dalam “*Kongres Nasional Pekerja Sosial Profesional Nasional Indonesia*”, Jakarta, 19 Agustus 1998.
 - 17.11. Diskusi “*Peningkatan Hubungan Kerja BPK RI & DPR RI*”, Jakarta, 5 Maret 1999.
 - 17.12. “*Completed a 48-Hour Course*”, IALF, 27 July to 2 September 1999.

- 17.13. “*Completed a 55-Hour course*”, The British Council, Jakarta, 3 November 2000.
- 17.14. Lokakarya “Kependidikan dan Olah Raga”, KBRI Thailand, Bangkok, 5-6 Juli 2002.
- 17.15. “*Parliamentary Internship Training Program, India Parliament*”, New Delhi, 19 September to 8 November 2002.
- 17.16. “Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Jepang Kelas A – 48 Jam”, DPR RI, Jakarta, 19 April s.d 20 Juli 2004.
- 17.17. “Pelatihan Metodologi Riset Ekonomi dan Pengaruh APBN terhadap Kesejahteraan Rakyat Bagi Staf Sekretariat DPR”, Lembaga Penelitian SMERU, 28 Maret – 16 Juni 2005.
- 17.18. “*Completed a Japanese Course in CKI Center – Pre-Intermediate Level*”, Jakarta, 17 April to 21 June, 2006.
- 17.19. “*International Training Program on The Right of The Child - A Practical Approach - Phase I*, Stockholm, Sweden, October 1 – 19, 2007.
- 17.20. Lokakarya Nasional Penulisan Artikel pada Jurnal Nasional dan Internasional, Malang, 27 – 30 Maret 2008.
- 17.21. “*International Training Program on the Rights of the Child – A Prtactical Approach – Phase II*”, New Delhi, India, April 29 to May 2, 2008.
- 17.22. “*Satisfactory Completed the Elementary 1 of Japanese Course*”, Duta Talenta Utama, Jakarta, 19 Juni 2008.
- 17.23. “*Participation in the National Confrence of State Legislatures 2008 Summit*”, New Orleans, Louisiana, USA, July 16-26, 2008.
- 17.24. “Pelatihan Penyusunan Rancangan Penelitian Ilmiah”, Biro Keanggotaan dan Kepegawaian Setjen DPR RI, Jakarta, 03-14 November 2008.
- 17.25. “*Indonesian Parliamentary Expert Staff Training Security Sector Reform Dynamics in Indonesia*”, Yogyakarta, 27-28 July, 2009.
- 17.26. *General Lecture for Post-Graduate Student on “Management of Faith-based Organization*”, Department of Social Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia, Depok, October 23, 2009.

- 17.27. Seminar Sehari “*Persiapan Penulisan Disertasi*”, Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia, Depok, 17 November 2009.
- 17.28. *International Seminar on “Human Rights Perspective: A Challenge for Social Work Practices and Education in Indonesia”*, Department of Social Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia, Depok, May 3, 2010.
- 17.29. Seminar “*From Institutional to Community Based Intervention*”, FISIP Universitas Indonesia Bekerjasama dengan VU University (Amsterdam), Netherlands Leprasi Relief, dan CBM (Community Based Management), Depok, 2 Agustus 2010.
- 17.30. *International Public Lecture on “Local Governance and Social Policy”*, Department of Social Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia, Depok, October 18, 2010.
- 17.31. *International Public Lecture “Indigenizing Social Work: Theory, Model and Practice”*, University of Indonesia, Depok, 25th of February, 2011.
- 17.32. Workshop Bidang Kesejahteraan Sosial “*Bahasa Pada Rancangan Undang-Undang, Tulisan Ilmiah dan Tulisan Ilmiah Populer*”, Setjen DPR RI, Jakarta, 10 Maret 2011.
- 17.33. Workshop Internal Bidang Kesejahteraan Sosial “*Pembangunan Sosial dan Tugas Parlemen*”, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 23 Maret 2011.
- 17.34. Diskusi Kepakaran Bidang Kesejahteraan Sosial “*Perspektif Kebijakan dan Implementasi Pendidikan Karakter pada Pendidikan Dasar*”, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 6 April 2011.
- 17.35. “*Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia*”, Jakarta, 21 Februari 2012.
- 17.36. Diskusi Internal Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan Tema “*Sumber Informasi Penelitian: Data Primer dan Data Sekunder*”, Jakarta, 16 Juli 2012.

- 17.37. Diskusi Internal Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan Tema "*Penyuntingan Artikel Ilmiah Menuju Akreditasi LIPI 2012*", Jakarta, 18 September 2012.
- 17.38. Diskusi Internal Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan Tema "*Kebijakan dan Implementasi Rancangan Sekolah Bertaraf Internasional*", Jakarta, 19 September 2012.
- 17.39. *Workshop Web of Science: "Tools to Optimise Citation to Produce an Effective Thesis and Research Papers"*, Depok, 7 Februari 2013.
- 17.40. Workshop Internal Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan tema "*Metodologi dalam Paradigma Sistem Berfikir (System Thinking)*", Jakarta, 6 Mei 2013.
- 17.41. "*Pelatihan Penulisan Artikel Jurnal Bidang Sosial Humaniora*", Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok, 8 & 10 Mei 2013.
- 17.42. Seminar Internal Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan Tema "*Policy Brief sebagai Alternatif Penerbitan Info Singkat*", Jakarta, 28 Juni 2013.
- 17.43. Diskusi Internal Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan Tema "*Relevansi Karya Tulis Ilmiah dengan Pelaksanaan Fungsi DPR*", Jakarta, 11 September 2013.
- 17.44. Diskusi Internal Bidang Pengkajian Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan tema "*Permasalahan Tripartit: Pemerintahan, Pengusaha, dan Masyarakat Adat*", Jakarta, 29 November 2013.
- 17.45. Seminar Bidang Pengkajian Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan tema "*Pengelolaan Jurnal Ilmiah*", Jakarta, 7 Maret 2014.
- 17.46. Workshop Internal Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan Tema "*Implementasi UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kendala dan Solusinya*", Jakarta, 20 Maret 2014.

- 17.47. Seminar Kepakaran Bidang Pengkajian Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan tema “*Evaluasi Akademisi terhadap Kinerja DPR Periode 2009-2014 dalam Bidang Legislasi, Hubungan Internasional, dan Masalah Sosial*”, Jakarta, 16 April 2014.
- 17.48. Workshop Bidang Pengkajian Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan tema “*Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, Jakarta, 16 Mei 2014.
- 17.49. Diskusi Internal Bidang Kesejahteraan Sosial - Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan tema “*Menghitung Komponen Hidup Layak dan Upah yang Pantas Bagi Buruh*”, Jakarta, 15 April 2015.
- 17.50. Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tema “*Harmonisasi Kebijakan Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional*”, Jakarta, 24 November 2015.
- 17.51. Seminar Internal Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan tema “*Deradikalisasi dan Kontra-Terrorisme melalui Nilai-Nilai Budaya Pancasila*”, Jakarta, 10 Mei 2016.
18. Publikasi Ilmiah:
- 18.1. Skripsi: “*Peranan Acara “Khazanah Dunia Pustaka” dalam Menumbuhkan Minat Baca Mahasiswa (Studi Korelasional antara Acara “Khazanah Dunia Pustaka” dari TVRI Stasiun Yogyakarta dengan Minat Baca Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang)*”, UNDIP, Semarang, 1990.
- 18.2. Tesis: “*Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK (Program UP2K PKK) (Studi Kasus di Desa Pakualam, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat)*”, Jakarta, 2000.
- 18.3. “*Pendidikan Prasekolah Untuk Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia di Masa Mendatang*”, Jurnal Kajian No. 01/Mei/1996.
- 18.4. “*Peranan Keluarga, Sekolah dan Lembaga Sosial dalam Pencegahan Penyalahgunaan Psikotropika*”, Jurnal Kajian No. 06/Juli/1997.

- 18.5. “*Peranan Politik Wanita Indonesia*”, dalam Buku: “*Wanita dalam Pembangunan (Studi terhadap Relevansi Peraturan Perundang-Undangan RI terhadap Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita)*”, Ujianto Singgih Prayitno (Penyunting), Jakarta : P3I Setjen DPR RI, 1996, ISBN : 979-9052-01-7.
- 18.6. “*Analisa terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan RI Tentang Hak-hak Wanita dalam Bidang Perkawinan/Keluarga*”, dalam Buku: “*Wanita dalam Pembangunan (Studi terhadap Relevansi Peraturan Perundang-Undangan RI terhadap Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita)*”, Ujianto Singgih Prayitno (Penyunting), Jakarta : P3I Setjen DPR RI, 1996, ISBN: 979-9052-01-7.
- 18.7. “*Reformasi Pendidikan : Antisipasi Terhadap Tantangan Abad XXI*”, Jurnal Kajian No. 10/Agustus/1998.
- 18.8. “*Masalah Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Mencari Format Pengentasan Kemiskinan yang Tepat)*”, dalam Buku: “*Pembangunan Sosial (Teori dan Implikasi Kebijakan)*”, Sali Susiana & Yulia Indahri (Penyunting), Jakarta : P3I Setjen DPR RI, Jakarta, Tahun 2000, ISBN 979-9052-06-8.
- 18.9. “*KPS BBM Bidang Pendidikan: Suatu Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin*”, dalam Buku: “*Kesejahteraan Sosial: Wacana, Implementasi, dan Pengalaman Empirik*”, Didiet Widiowati (Penyunting), P3DI Setjen DPR RI, Jakarta, 2005. ISBN 979-9052-37-8.
- 18.10. “*Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana*”, dalam Buku: “*Pembangunan Kesejahteraan Rakyat: Tinjauan Terhadap Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK*”, Ujianto Singgih (Penyunting) P3DI Setjen DPR RI, Jakarta, 2006. ISBN. 978-979-9052-40-7.
- 18.11. “*Program Bantuan Langsung Tunai dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*”, Jurnal Kajian Vol. 11, No. 1, Maret, 2006. Akreditasi: No.86/AKRED-LIPI/ P2MBi/5/2007.
- 18.12. “*PRT Center dan Pemberdayaan Pekerja Rumah Tangga*”, Jurnal Kajian Vol. 12, No. 2, Juni 2007. Akreditasi: No.86/AKRED-LIPI/ P2MBi/5/2007.

- 18.13. “*Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga*”, Jurnal Kajian Vol. 13, No. 1, Maret 2008. Akreditasi: No.86/AKRED-LIPI/ P2MBi/5/2007.
- 18.14. “*Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1999-2004 terhadap Penanganan Masalah Anak*”, dalam Jurnal Kajian Vol. 14, Maret 2009. Akreditasi Kajian: No.86/AKRED-LIPI/ P2MBi/5/2007, ISSN: 0853-9316.
- 18.15. “*Mengharap Dampak Positif Anggaran 20 Persen Bagi Masyarakat Miskin*”, dalam Buku: “*Masalah Konstitusi dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan 20 % dalam Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Indonesia*”, Editor: Makmuri Sukarno, Penerbit: P3DI Setjen DPR RI, Jakarta, 2009, ISBN: 978-979-9052-44-5.
- 18.16. “*Membangun Manajemen Bencana: Sebuah Tantangan Pembangunan Sosial di Indonesia*”, dalam Buku: “*Tantangan Pembangunan Sosial di Indonesia*”, Editor: Didit Widiowati, Penerbit: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Jakarta, 2009, ISBN: 978-979-9052-52-0.
- 18.17. “*Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Tengah Krisis Ekonomi Global*”, dalam Buku: “*Krisis Ekonomi Global dan Tantangan dalam Penanggulangan Kemiskinan*”, Editor: Rusydi Syahra, Penerbit: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Jakarta, 2009, ISBN: 978-979-19757-5-9.
- 18.18. “*Catatan Kritis tentang Penanggulangan Kemiskinan*”, dalam Buku: “*Pembangunan Sosial: Wacana, Implementasi, dan Pengalaman Empirik*”, Editor: Ujianto Singgih Prayitno, Penerbit: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Jakarta, 2010, ISBN: 978-979-9052-59-9.
- 18.19. “*Kesiapan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara)*”, Jurnal Kajian Vol. 18, No. 2, Juni 2013, ISSN: 0853-9316.

- 18.20. *“Program Jaminan Sosial di Kabupaten Jembrana dan Kota Yogyakarta*, Jurnal Aspirasi Vol. 4 No. 1, Juni 2013, ISSN: 2086-6305.
- 18.21. *“Tahun Baru Imlek dan Upaya Pembauran di Indonesia”*, Info Singkat Vol. IV, No. 02/II/P3DI/Januari/2012, ISSN: 2088-2351.
- 18.22. *“Masalah Kurikulum Baru Tahun 2013”*, Info Singkat Vol. IV, No. 24/II/P3DI/2012, ISSN: 2088-2351.
- 18.23. *“Letusan Gunung Sinabung dan Penanganan Bencana di Indonesia”*, Info Singkat Vol. 18/II/P3DI/September/2013, ISSN: 2088-2351. – (Nilai 5)
- 18.24. *“Dampak Sosial Penutupan Lokalisasi Dolly”*, Info Singkat Vol. VI. No. 13/I/P3DI/2014.
- 18.25. *“Upaya Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia”*, dalam Buku: *“Jaminan Sosial di Indonesia (Upaya Memberikan Perlindungan Sosial kepada Masyarakat)”*, Editor: Sari Viciawati Machdum, Penerbit P3DI Setjen DPR RI Jakarta & Azza Grafika Yogyakarta (anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012), 2013, ISBN: 978-602-1247-01-3.
- 18.26. *“BPJS Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (Sebuah Analisis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Nasional di Indonesia)”*, dalam Buku: *“Jaminan Kesehatan Nasional dan Transformasi Jaminan Sosial”*, Penyunting: Dumilah Ayuningtyas, Penerbit: P3DI Setjen DPR RI Jakarta & Azza Grafika Yogyakarta (Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012), 2014, ISBN: 978-602-1247-11-2.
- 18.27. Buku: *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui PNPM-Mandiri Perkotaan di Kota Batam”*, Cetakan Kedua, Editor: Yulia Indahri, Penerbit: Publica Press, Anggota IKAPI Jakarta, No. 473/DKI/XII/2013, 2014, ISBN: 978-602-9717-79-2.
- 18.28. *“Ketersediaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Studi di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Kota Jayapura, Provinsi Papua)”*, Jurnal Kajian Vol. 19, No. 03 September 2014. – (Menulis bersama: Yulia Indahri, Tri Rini Puji Lestari, Hartini Retnaningsih, Lukman Nul Hakim, dan Rahmi Yuningsih)

- 18.29. “*Fenomena Ichiro: Aksi Main Hakim Sendiri di Jalan Raya*”, Info Singkat Vol. VII, No. 03/I/P3DI/Februari 2015.
- 18.30. “*Ujaran Kebencian di Tengah Kehidupan Masyarakat*”, dalam Info Singkat Vol. VII, No. 21/I/P3DI/November/2015.
- 18.31. “*Dampak Sosial yang Diharapkan dan Kendala-Kendala dalam Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional*”, dalam buku “Menuju Indonesia Sehat & Jaminan Kesehatan Nasional yang Lebih Baik”, Editor: Sari Viciawati Machdum, Penerbit: P3DI Setjen DPR RI & Azza Grafika, Jakarta, 2015, ISBN: 978-602-1247-33-4.
- 18.32. “*Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat*”, Jurnal Aspirasi, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.
- 18.33. “*Jaminan Sosial dan Ketahanan Keluarga (Sebuah Analisis tentang Peranan Jaminan Sosial dalam Mendukung Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga)*”, dalam Buku “Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa”, Editor: Rr. Endah Sulistyaningsih, Penerbit: Badan Keahlian DPR RI & Dian Rakyat, Jakarta, 2016.
- 18.34. “*Strategi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan dalam Upaya Perlindungan Pekerja di Kota Surabaya dan Kota Pekanbaru*”, Jurnal Aspirasi, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
19. Publikasi Populer/Artikel:
- 19.1. “*Kerja Sama Polri dan Masyarakat*”, SK Angkatan Bersenjata, Jakarta, 24 Maret 1994.
- 19.2. “*Polri, Tugas dan Perubahan Sosial*”, SK Angkatan Bersenjata, Jakarta, 13 April 1994.
- 19.3. “*Stabilitas Emosi dalam Tugas Polisi*”, SK “Berita Yudha”, Jakarta, 20 Juni 1994.
- 19.4. “*Polisi, di Antara Marsinah dan Ria Irawan*”, SK “Angkatan Bersenjata”, Jakarta, 23 Juni 1994.
- 19.5. “*Renungan Hari Bhayangkara*”, SK “Angkatan Bersenjata”, Jakarta, 1 Juli 1994.
- 19.6. “*Debt Collector: Keresahan Masyarakat dan Tugas Polri*”, SK “Angkatan Bersenjata”, Jakarta, 28 September 1994.

- 19.7. “*Makna Pemahaman Nilai Juang 1945 Bagi Tugas Polri*”, SK “Angkatan Bersenjata”, Jakarta, 5 Nopember 1994.
- 19.8. “*Polisi dan Konflik Sosial*”, SK “Angkatan Bersenjata”, Jakarta, 29 Juli 1995.
- 19.9. “*Menggugat Pencemaran*”, SK “Merdeka”, Jakarta, 29 Agustus 1995.
- 19.10. “*Menepis Krisis Citra Polri*”, SK “Angkatan Bersenjata”, Jakarta, 5 Oktober 1995.
- 19.11. “*Menindaklanjuti COP-II CBD*”, SK “Angkatan Bersenjata”, Jakarta, 5 Desember 1995.
- 19.12. “*Renungan Atas Bencana Kerinci*”, SK “Berita Yudha”, Jakarta, 11 Desember 1995.
- 19.13. “*Realitas Nasib dan Kedisiplinan Wanita*”, SK “Angkatan Bersenjata”, Jakarta, 22 Desember 1995.
- 19.14. “*Kenaikan Tarif dan Masalah Angkutan Umum di Jakarta*”, SK “Angkatan Bersenjata”, Jakarta, 1 Pebruari 1996.
- 19.15. “*Tugas Polisi dalam Kelompok Sosial*”, SK “Angkatan Bersenjata”, Jakarta, 10 April 1996.
- 19.16. “*RUU Penyiaran : Masih Perlu Penyempurnaan*”, SK “Merdeka”, Jakarta, 9 Juli 1996.
- 19.17. “*Harapan Terhadap UU Penyiaran*”, SK “Angkatan Bersenjata”, Jakarta, 7 Nopember 1996.
- 19.18. “*Menyiapkan Undang-Undang Penyiaran yang Relevan dengan Zaman*”, Majalah “Parlementaria” No. 16 Th XXVIII, Jakarta, 1996.
- 19.19. “*Penanganan Preventif Terhadap Masalah Penyalahgunaan Psikotropika*”, Majalah “Padmanagri” No. 5 April 1997.
- 19.20. “*Sisi Negatif Keikutsertaan Anak dalam Kampanye*”, Majalah “Parlementaria” No. 19 Th. XXIX, Jakarta, 1997.
- 19.21. “*Program Bantuan bagi Masyarakat Miskin: BLT, PKH, dan Bansos*”, Info Singkat Vol. I, 008/II/P3DI/0409.
- 19.22. “*UN dan SNMPTN yang Kian Meresahkan*”, Info Singkat Vol. I, No. 013/I/P3DI/0709 2009.

- 19.23. “*Mudik Lebaran: Tradisi Tahunan yang Menyenangkan Sekaligus Melelahkan*”, Info Singkat Vol. I, No. 18/II/P3DI/0909.
- 19.24. “*Ujian Nasional dan Masalah Kejujuran dalam Pendidikan*”, Info Singkat Vol. III, No. 12/II/P3DI/Juni/2011.
- 19.25. “*Wacana Warga Negara Asing Menjadi Rektor di Perguruan Tinggi Negeri*”, Info Singkat Vol. VIII, 11/I/P3DI/Juni/2016.
- 19.26. “*Dilema Upaya Peningkatan Kompetensi Dokter Layanan Primer di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama*”, Info Singkat Vol. VIII, No. 20/II/P3DI/Oktober/2016.
- 19.27. “*Pengalihan Kepesertaan Jaminan Sosial PNS dari PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan*”, dalam Info Singkat Vol. IX No. 09/I/PUSLIT/MEI/2017.
20. Tanda Jasa/Penghargaan
- 20.1. Piagam Penghargaan: *Juara Hiburan I Penulisan Artikel – “Polisi dan Konflik Sosial”*, Mabes Polri, Jakarta, 17 Oktober 1995.
- 20.2. Piagam Penghargaan: *Darma dan Karya dalam Penyelenggaraan Sidang Umum MPR RI Tahap II*, Jakarta, 1-11 Maret 1998.
- 20.3. Piagam Penghargaan: *Darma dan Karya dalam Konperensi Ke-104 Inter-Parliamentary Union (IPU)*, Jakarta, 15-21 Oktober 2000.
- 20.4. Tanda Kehormatan: Satyalancana Karyasatya X Tahun, Tanggal 1 Agustus 2008 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No: 025/TK/Tahun 2008.
- 20.5. Tanda Kehormatan: Satyalancana Karyasatya XX Tahun, Tanggal 15 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80/TK/Tahun 2015.

Biografi Editor



1. Nama: **Dr. H. Syahganda Nainggolan, M.T.**
2. Jenis Kelamin: Laki-laki
3. Agama: Islam
4. Tempat/Tgl. Lahir: Medan, 27 November 1965
5. Keluarga:
 - 5.1. Fleur Paumen (Istri, Alumnus Psychology of Leiden University)
 - 5.2. Ahmad Bram Satria Nainggolan (Anak, Mahasiswa Teknik Elektro, FT UI)
 - 5.3. Annabelle Zainab (Anak, SMA 38 Jakarta Selatan)
 - 5.4. Fitri Jasmine (Anak, SMP Nurul Fikri, Depok)
6. Jabatan: Chairman pada Sabang Merauke Circle (Lembaga Kajian Kebijakan Publik), Jakarta.
7. Alamat Kantor: Jl. Tebet Barat Dalam II E No. 24 Jakarta Selatan
8. Hp.: 0811143895
9. *Email:* synainggolan@gmail.com

10. Riwayat Pendidikan:

- 10.1. 1984-1989: Teknik Geodesi dan Geomatika, Institut Teknologi Bandung, tidak lulus.
- 10.2. 1998-2002: STIE I/BMI, Jakarta, Sarjana.
- 10.3. 2002-2005: Pascasarjana Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung, Master.
- 10.4. 2009-2015: Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Indonesia, Doktor.

11. *Short Courses*:

1994-1995: Fakultas Ekonomi, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands.

12. Riwayat Pekerjaan:

- 12.1. 1998-1999: Staf Khusus Menteri Koperasi RI
- 12.2. 2004-2009: *Execuctive Director* pada Center For Information and Development Studies (CIDES).
- 12.3. 2006-2007: Staf Khusus Presiden Direktur pada PT Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan).
- 12.4. 2006-2008: Komisaris pada PT Pelabuhan Indonesia II.
- 12.5. 2008-2014: Komisaris pada PT Samudra Biru, Cibinong, Garment Industry.
- 12.6. 2009-Sekarang: Chairman pada Sabang Merauke Circle, (Lembaga Kajian Kebijakan Publik), Jakarta.
- 12.7. 2016-Sekarang: Dosen Pengantar Sosiologi dan Sosiologi Politik, Jurusan Politik, FISIPOL UKI.

13. Riwayat Organisasi:

- 13.1. 2006-Sekarang: Dewan Syariah pada Serikat Buruh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI 98)
- 13.2. 2012-2015: Anggota Dewan Pakar pada Alumni Institut Teknologi Bandung.

14. Lain-lain:

- 14.1. Penguji pada sidang hasil riset, pra-promosi, dan promosi Program Doktor pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, atas nama Dr. Dewi Sri Takarini, 2017.

- 14.2. Pembicara pada Diskusi “Kebijakan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan”, Pusat Penelitian – Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 28 September 2017.
- 14.3. Menulis sejumlah esai tentang Pembangunan Manusia, Ekonomi, Politik, dan Kesejahteraan Sosial di berbagai media online.